

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM

4.1.1 Sejarah Berdirinya Partai Golongan Karya (Golkar)

Sejarah Partai Golkar (Golongan Karya) bermula pada tahun 1964 yakni ditandai dengan berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Sekber Golkar dibentuk pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.

Golkar menyatakan diri bukan partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Pada dasarnya Golkar dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Setelah Presiden Soeharto oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1998, kekuasaan orde baru-pun berakhir. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai

ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar.

4.1.2 Visi dan Misi Partai Golkar

1. Visi Partai Golkar

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

2. Misi Partai Golkar

- a Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

- c Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.
3. Tujuan Partai Golkar yaitu 1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945; 4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

4.1.3 Tugas Pokok Partai Golkar

Tugas pokok Partai Golkar adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

4.2 PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Konflik Internal Partai Golkar

“Menurut Zulkifli Hamid dan Toto Pribadi, perpecahan dalam parpol (partai politik) bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dan persaingan terkait kepemimpinan dalam partai (Meutya Viada Hafid, 2018: 15–30)”.

Pada tahun 2014-2016 dalam elit Partai Golkar terjadi perbedaan pandangan hingga memunculkan perpecahan (konflik internal).

“Iya, saya mengetahui adanya cara-cara untuk diluar system AD/RT untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) yaitu menginginkan pemilihan secara aklamasi dan tidak memberikan kesempatan kepada kader lain untuk berkompetisi. Pengkhianatan terhadap doktrin Golkar, sehingga menimbulkan konflik”. (wawancara dengan Amin Luther, tanggal 22 November 2019)

Hasil wawancara dengan Amin Luther diatas menjelaskan bahwa penyebab konflik internal Partai Golkar pada tahun 2014 adalah karena adanya cara-cara untuk diluar system AD/RT untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) yaitu menginginkan pemilihan secara aklamasi dan tidak memberikan kesempatan kepada kader lain untuk berkompetisi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Yanda Zaihifni Ishak yakni sebagai berikut.

“Mengetahui, kubu Agung Laksono tidak puas munas Bali ... Tidak berjalannya komunikasi antara pimpinan partai, sehingga banyak pelanggaran aturan partai terjadi”. (wawancara dengan Yanda Zaihifni Ishak tanggal 16 Desember 2019)

Hasil wawancara dengan Yanda Zaihifni Ishak menunjukkan bahwa konflik internal dalam tubuh partai Golkar akibat dari tidak terjalannya komunikasi antar pimpinan partai dan adanya rasa ketidakpuasan oleh salah satu pihak (Kubu Agung Laksono) terhadap pihak lain (yakni Aburizal Bakrie).

Konflik antar elit Partai Golkar terjadi antara tahun 2014-2016, ini pada satu titik hampir membuat partai terpecah bahkan bubar, yaitu ketika terjadinya Musyawarah Nasional (Munas) Tandingan dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Tandingan di dalam tubuh Partai Golkar oleh kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Kubu Aburizal Bakrie pada 30 November sampai 2 Desember 2014 melangsungkan Munas (Musyawarah Nasional) di Bali. Sementara, Kubu Agung Laksono menyusul juga menyelenggarakan Munas di Ancol, Jakarta, pada tanggal 6-8 Desember 2014.

Konflik ini disebabkan bergabungnya Aburizal Bakrie pada calon Presiden Prabowo-Hatta yang membuat beberapa kader Partai Golkar kecewa. Tampak dari Beberapa kader Partai Golkar di daerah yang mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebagai contoh 30 DPD II Golkar, seperti DPD II Golkar Banda

Aceh mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu, Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo.

Muhammad Jusuf Kalla (JK) dianggap sebagai kader senior dari Partai Golkar yang telah memiliki pengalaman dan dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Sebagai tokoh senior JK mempunyai banyak pengalaman di pemerintahan dan juga mempunyai pengaruh besar terhadap simpatisan dan kader Partai Golkar di provinsi dan daerah.

Akibat dukungan terhadap salah satu calon, internal Partai Golkar menjadi terpecah. Disinilah terjadi praktek lobi politik untuk menyelamatkan diri masing demi mendapatkan jabatan/ mempertahankan jabatan dan kekuasannya. Sehingga perpecahan ini semakin memuncak ketika adanya perbedaan pendapat mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Bila sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sesuai Munas Riau tahun 2009, seharusnya Munas dilaksanakan pada Januari 2015. Akan tetapi, Aburizal Bakrie mempercepat penyelenggaraan Munas pada 30 November hingga 2 Desember 2014 di Bali.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Viktor Abraham Abaidata yakni sebagai berikut.

“Akibat Aklamasi Munas di Bali yang tidak membuka ruang Demokrasi menyebabkan perpecahan sehingga muncullah Munas Golkar lanjutan di Ancol Jakarta. Munas aklamasi di Bali tidak ada kandidat lain selain ARB sehingga tidak memberikan ruang demokratis. Munas lanjutan yang dilaksanakan di Ancol Jakarta diikuti oleh 3 kompetitor yaitu : 1. Bpk. Agung Laksono, 2. Bpk. Agus Gumiwang Kartasasmita, 3. Bpk. Priyo Budi Santoso. Musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat. Akhirnya dilaksanakanlah voting/pemilihan, dan yang terpilih secara demokratis adalah pak Agung Laksono”. (wawancara dengan Viktor Abraham Abaidata tanggal 22 November 2019).

Agung Laksono menolak percepatan Munas dan meminta agar Munas tetap diselenggarakan pada Januari 2015. Agung Laksono bersama kelompoknya membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan mengadakan Munas Tandingan. Akibat dari konflik internal tersebut, partai Golkar terpecah menjadi dua (yakni kubu ARB dan Kubu AL).

“Akibat dari pemaksaan kehendak (sudah gagal dalam mengelola partai) lantas dikondisikan Munas Aklamasi berujung perpecahan yang melahirkan dualism antara partai Golkar Kubu ARB Munas Bali dan Partai Golkar AL versi Munas Ancol. Meski kemudian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengakui dan mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol” (wawancara dengan Viktor Abraham Abaidata tanggal 22 November 2019).

Amin Luther menambahkan bahwa akibat konflik internal Partai Golkar ini antara lain:

“Satu, adanya jarak diantara kader satu dengan kader lainnya yang dulunya berteman menjadi tidak berteman. Dan kedua di dalam pengambilan keputusan adanya pertentangan yang luar biasa, contohnya untuk penentuan Calon Bupati, dan calon Gubernur tidak ada kesepakatan. Kemudian perolehan suara Golkar pada Pilkada Tahun 2018 dan 2019 ini banyak yang tidak terpilih.

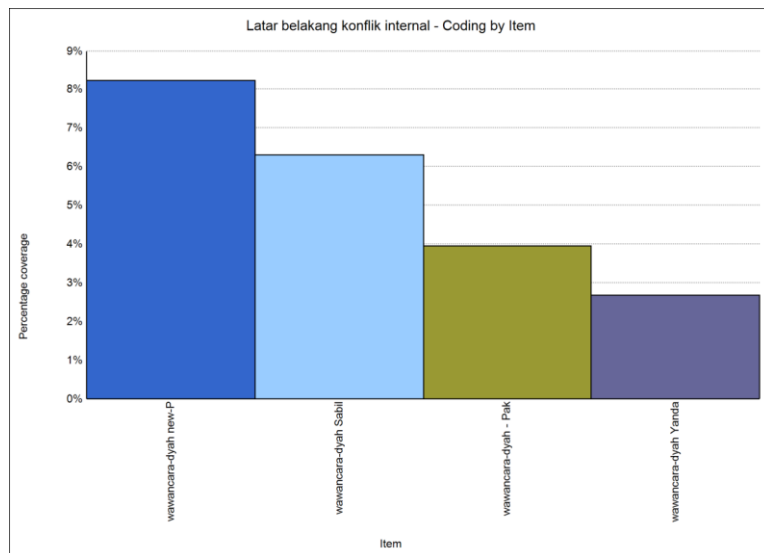
Dampaknya terlebih pada Pemilu Tahun 2019 ini menurun untuk partai Golkar”. (wawancara dengan Amin Luther, tanggal 22 November 2019).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa konflik internal partai Golkar membawa dampak yang signifikan bagi keberlangsungan organisasi. Partai Golkar mendekati pada kehancuran dan kepercayaan Publik pun menurun. Konflik antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak hanya membuat perpecahan di elit Partai Golkar, tetapi juga memunculkan konflik di Fraksi Partai Golkar DPR RI dan pengurus Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya.

Konflik yang terjadi di tingkat elit Partai Golkar terus berkembang bukan hanya pada tingkat Partai Golkar, tetapi hingga konflik antar lembaga negara, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif.

Dalam hal ini langkah peyelesaikan konflik internal harus segera dilakukan untuk menanggulagi dampak yang semakin luas lagi. Menurut Fisher, Morton Deutsc, Peter T Coleman, Eric C. Marcus ada beberapa metode penyelesaian konflik, yakni: negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan. Hal ini senada dengan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 32 berbunyi:

- a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- b. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- c. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART..



Gambar 4. 1 Persentase Latar Belakang Konflik Internal

Dari hasil analisis *Crosstab Query* dengan menggunakan *software Nvivo 12 Plus* bahwa latar belakang konflik internal Partai

Golkar; menurut hasil wawancara dengan pak Samsul Hidayat lebih banyak persentasenya yakni sebesar 8 %. Selanjutnya dengan pak Sabil sebesar 6 %, dengan pak Amin sebesar 4 %, dan pak Yanda sebesar 2,8 %.

2. **Negosiasi**

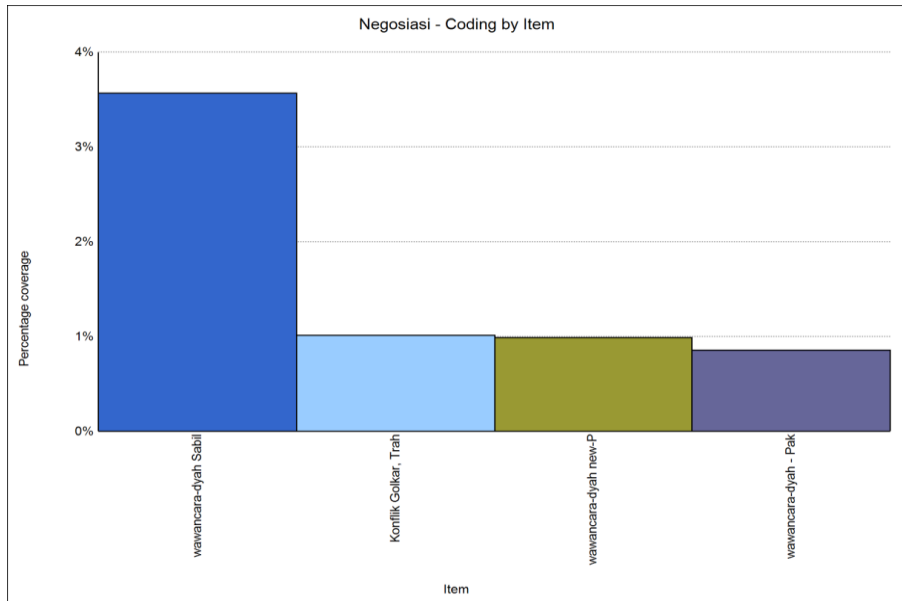
Negosiasi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh ke dua kubu atau pihak lain dalam konflik (sengketa) internal partai. Dalam hal ini para elit Partai Golkar yang sedang bersengketa juga melakukan proses negosiasi untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Viktor Abraham Abaidata.

“Upaya negosiasi sempat dilakukan menjeang Pilkada,”. (wawancara dengan Viktor Abraham Abaidata tanggal 22 November 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh :

“Sebenarnya sudah ada (negosiasi) yang dinamakan dengan Islah untuk kedua kubu. Hanya saja ada kekurangan karena pada saat Munaslub di Bali banyak dari pengurus Ancol tidak dijadikan peserta dan tidak punya hak suara dan berakibat pada saat penyusunan pengurus, kubu Ancol banyak yang tidak dimasukkan ke dalam kepengurusan. Benih-benih itu masih terasa sehingga ada 9 kader yang melakukan gerakan yaitu dengan membentuk partai baru yaitu partai Berkarya” (wawancara dengan Amin Luther, tanggal 22 November 2019).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa para elit partai Golkar yang terlibat dalam konflik telah melakukan proses negosiasi guna mencapai titik temu lagi.



Gambar 4. 2 Presentase Proses Penyelesaian Konflik Internal Pada Partai Golkar Dengan Cara Negosiasi

Sumber: (Crosstab Query with Nvivo 12 Plus, 2020)

Dari hasil analisis *Crosstab Query* dengan menggunakan *software Nvivo 12 Plus* bahwa dalam langkah penyelesaian konflik internal Partai Golkar berdasarkan hasil wawancara; langkah yang diambil melalui upaya negosiasi menurut pak Sabil Rachman lebih banyak yakni sebesar 3,8%, menurut pak Samsul Hidayat yakni sebesar 1 %, menurut pak Amin sebesar 1 %, menurut pak Yanda 0,9 %.

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan melalui diskusi atau perundingan

kedua kubu atau pihak yang melakukan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (dianggap sebagai penengah) yang netral diantara kedua kubu Golkar tersebut. Dalam hal ini

“... ketua dengan Pembina Partai Golkar yaitu Bpk. Yusuf Kalla yang juga apada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau yang membuat peta jalan, dengan menghadirkan kedua kubu. Namun upaya tersebut cukup berhasil untuk menyatukan kelompok elit. Namun pada tatanan struktur dibawahnya itu masih tetap terjadi dualisme ... Ya, ada proses mediasi juga yang melakukan semua itu adalah pak Yusuf Kalla”. (wawancara dengan Viktor Abraham Abaidata tanggal 22 November 2019).

Jusuf Kalla selaku pembina partai Golkar dan saat menjabat sebagai wakil presiden menurut penuturan dari telah berusaha untuk menjadi jembatan penghubung kedua belah pihak yang sedang bertikai (Aburizal Bakrie dan Agung Laksono). Hal senada juga diungkapkan oleh Samsul Hidayat. 17 Desember 2019

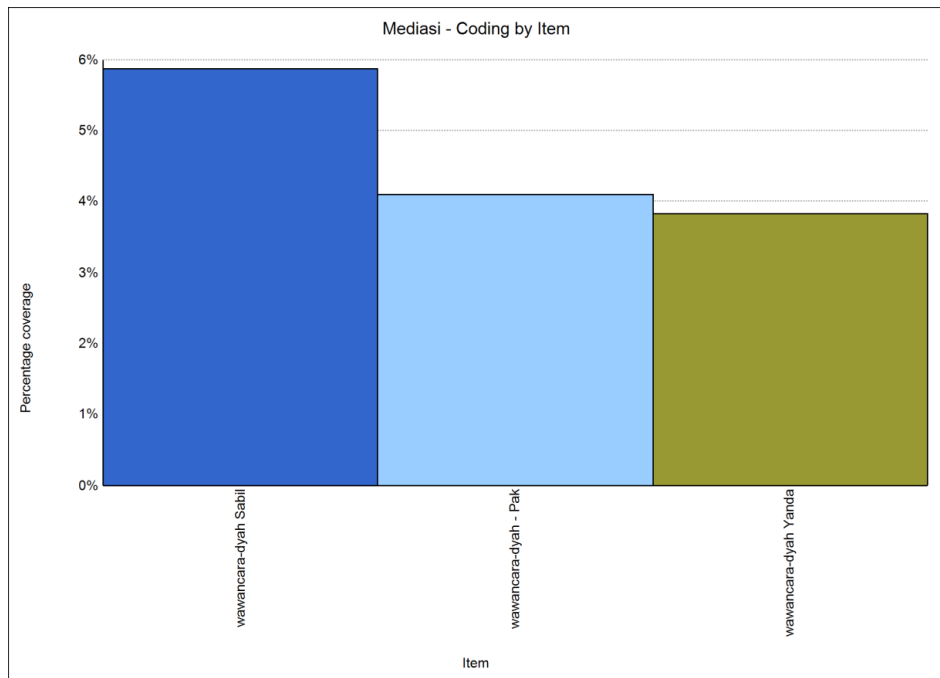
“... banyak misalkan dari Pak JK (Jusuf Kalla) dan Pak Luhut Binsar untuk memediasi dan melakukan upaya bersatu”. (wawancara dengan Samsul Hidayat tanggal 17 Desember 2019).

Jusuf Kalla mengakui jika dirinya berperan sebagai mediator. Sebelum tahun 2015, dirinya mengakui jika konflik Golkar berlanjut karena tidak ada proses mediasi. Sehingga Jusuf Kalla selanjutnya melakukan mediasi dan dipercaya oleh kedua pihak (Aburizal Bakrie dan Agung Laksono). Kedua belah pihak percaya Jusuf Kalla sebagai pihak yang netral. (Meutya Viada Hafid, 2018: 15–30).

Luhut Binsar Pandjaitan pun mengakui jika pihaknya sebagai Menkopolkam RI menginginkan Partai Golkar tidak pecah. Terdapat kekhawatiran jika Partai Golkar terpecah lagi akan tidak baik bagi demokrasi Indonesia. Secara keseluruhan terdapat tiga faktor pemerintah turut campur dalam konsensus Partai Golkar, *pertama*, ada keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk merangkul seluruh partai politik, *kedua*, Presiden Joko Widodo tidak ingin ada kegaduhan jika Partai Golkar pecah, ketiga disebabkan karena secara pribadi, Luhut merupakan kader Partai Golkar.

Di sisi lain, Luhut memandang penting bagi Partai Golkar untuk berkoalisi dengan pemerintah. Partai Golkar mempunyai mimpi pada tahun 2019 memperoleh 120 kursi. Kondisi tersebut akan mudah dicapai jika Partai Golkar bergabung dengan

pemerintah menjadi partai koalisi. Partai Golkar akan diuntungkan dengan popularitas Presiden Joko Widodo dan Partai Golkar akan terangkat suaranya.



Gambar 4. 3 Presentase Proses Penyelesaian Konflik Internal Pada Partai Golkar Dengan Cara Mediasi

Sumber: (Crosstab Query with Nvivo 12 Plus, 2020)

Dari hasil analisis *Crosstab Query* dengan menggunakan *software Nvivo 12 Plus* bahwa dalam langkah penyelesaian konflik internal Partai Golkar berdasarkan hasil wawancara; langkah yang diambil melalui upaya mediasi menurut pak Sabill Rachman lebih banyak yakni sebesar 5.9%, menurut pak Samsul Hidayat yakni sebesar 4 %, menurut pak Yanda 3,8 %.

4. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan kesepakatan atau perjanjian yang sudah dilakukan oleh ke dua kubu.

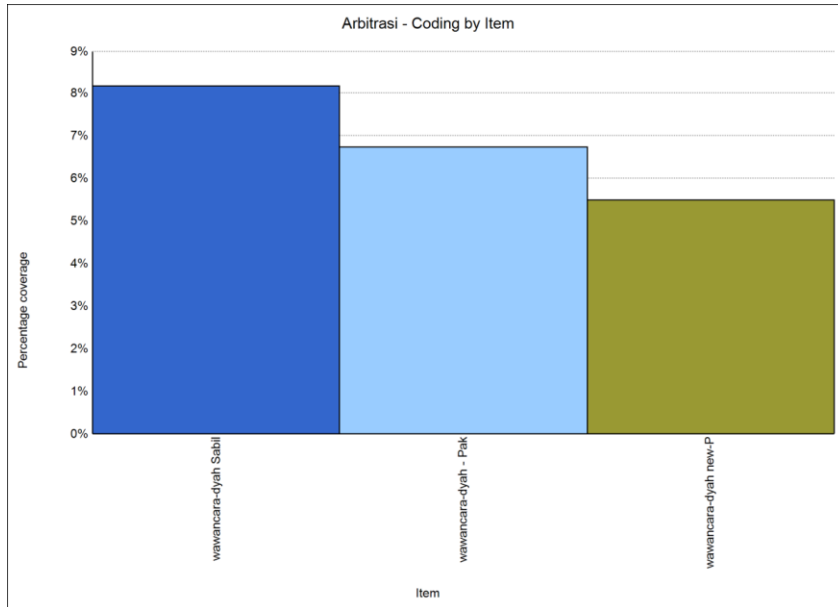
“*Pertama* kesepakatan Islah karena saat itu akan dilakukan Pilkada sehingga ada tim kecil yang berjumpa berjumlah 10 orang untuk menjaring calon Gubernur ataupun Calon Bupati/Calon walikota se-Indonesia. *kedua* Munaslub disepakati/diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan. Dan *ketiga* Masing-masing peserta (kubu) akan diakomodir pada saat Munas, namun pada kenyataannya tidak disepakati”. (wawancara dengan Amin Luther, tanggal 22 November 2019).

Amin Luther dalam wawancara tanggal 22 November 2019, mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak bersepakatan. *Pertama* membentuk tim 10 untuk persiapan Pilkada 2015. *Kedua* Munaslub disepakati/diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan. Dan *ketiga* Masing-masing peserta (kubu) akan diakomodir pada saat Munas.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sabil Rahman, yakni sebagai berikut ini.

“perjanjiannya adalah untuk sepakat mengusung calon pada Pilkada tahun 2015. Ada kesepakatan dari Pak Agung Laksono dan Pak Ical (Aburizal Bakie) membentuk tim kecil yang berjumlah 10 orang”. (Wawancara dengan Sabil Rahman Desember 2019).

Jusuf Kalla pun menyampaikan kekhawatiran akan bubarnya Partai Golkar menjadi alasan utama pemerintah turut campur dalam upaya konsensus Partai Golkar. Salah satu contoh keterlibatan tersebut tampak saat pembentukan Tim 10 Partai Golkar jelang Pilkada tahun 2015. Jika Partai Golkar tidak ikut dalam Pilkada maka dikhawatirkan Partai Golkar tidak didukung oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dikarenakan tidak ada bakal calon dalam Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat pusat maupun lokal/derah . untuk itu, tim kecil yang berjumlah 10 tersebut sepakat membuat Munaslub yang bersifat Aklamasi. Dalam Munaslub yang diselenggarakan pada Bulan Mei 2016 di Bali ada 7 (Tujuh) calon/kandidat yang akan maju sebagai Ketua Golkar pada saat itu. Adapun nama-nama calon tersebut adalah Bapak Setya Novanto, Ade Komaruddin, Airlangga Hartanto, Aziz Zamzuddin, Sahrul Yasin Limpo, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo. Dan nama yang paling unggul dalam kemenangan Munaslub tersebut pada saat itu adalah Bapak Setya Novanto yang terpilih menjadi Ketua Golkar dengan suara terbanyak dalam Munaslub Aklamasi tersebut.



Gambar 4. 4 Persentase Proses Penyelesaian Konflik Internal Pada Partai Golkar Dengan Cara Arbitrasi

Sumber: (Crosstab Query with Nvivo 12 Plus, 2020)

Dari hasil analisis *Crosstab Query* dengan menggunakan *software Nvivo 12 Plus* bahwa dalam langkah penyelesaian konflik internal Partai Golkar berdasarkan hasil wawancara; langkah yang diambil melalui upaya Arbitrasi menurut pak Sabil Rachman lebih banyak yakni sebesar 8%, menurut pak Samsul Hidayat yakni sebesar 6,9 %, menurut pak Amin sebesar 5 %.

5. Peradilan

Peradilan adalah tahapan yang di lakukan dengan penyelesaian peradilan melalui kasasi-kasasi dilakukan ke Mahkamah Agung

(MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kaitannya dengan konflik internal Partai Golkar menurut Victor :

“Konflik tersebut upaya yang dilakukan pertama adalah mengajukan ke PTUN dan kalah, lalu banding (Kubu Ancol kalah). Lalu melakukan banding lagi setelah itu melakukan Negosiasi. (wawancara dengan Viktor Abraham Abaidata tanggal 22 November 2019)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa konflik internal Partai Golkar antara Kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono sejak pertama-tama telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil dari PTUN dimenangkan oleh Kubu Aburizal Bakrie (Munas Bali). Hal senada disampaikan oleh Amin Luther:

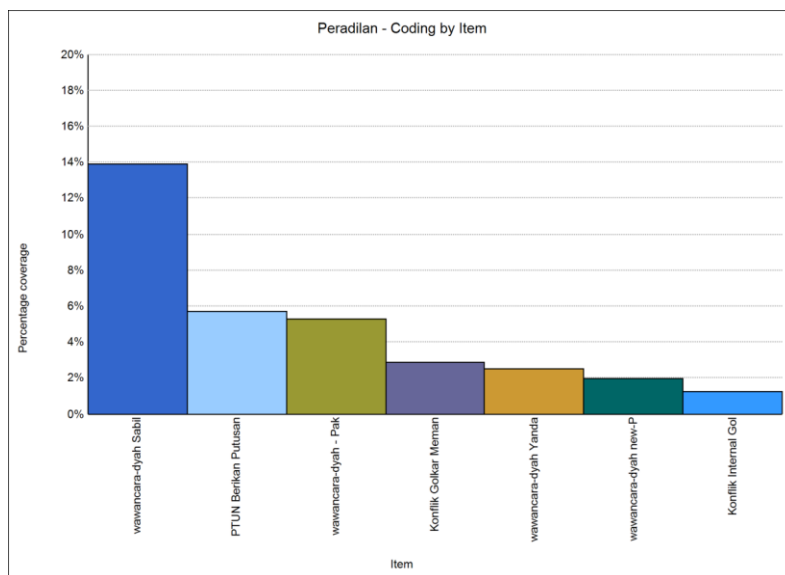
“Langkah-langkah yang sudah ditempuh semua, baik itu melalui Mahkamah Partai maupun ke Pengadilan negeri dan PTUN bahkan sampai ke MK” (wawancara dengan Amin Luther, tanggal 22 November 2019)

Yanda Zaihifni Ishak menambahkan sebagai berikut.

“Sidang Mahkamah Partai memenangkan kubu Agung Laksono, sedangkan di peradilan umum fifty 2 draw”. (wawancara dengan Yanda Zaihifni Ishak tanggal 16 Desember 2019).

Konflik internal Partai Golkar antara Kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono sejak pertama-tama telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan terkait sengketa dualisme

kepengurusan di tubuh Partai Golkar pada 18 Mei 2015. Pengadilan Tata Usaha Negara mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang berada di bawah kepemimpinan Agung Laksono untuk menjadi Ketua Golkar pada saat itu. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang berada di bawah kepemimpinan Agung Laksono.



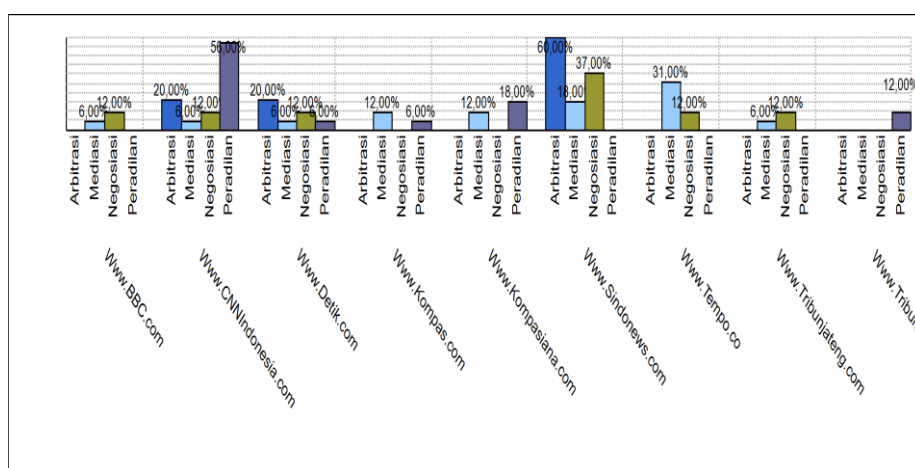
Gambar 4. 5 Persentase Proses Penyelesaian Konflik Internal Pada Partai Golkar Dengan Cara Peradilan

Sumber: (Crosstab Query with Nvivo 12 Plus, 2020)

Dari hasil analisis *Crosstab Query* dengan menggunakan *software Nvivo 12 Plus* bahwa dalam langkah penyelesaian konflik internal Partai Golkar berdasarkan hasil wawancara; langkah yang diambil melalui upaya Peradilan menurut pak Sabil Rachman lebih

banyak yakni sebesar 14%, menurut pak Samsul Hidayat yakni sebesar 5,9 %, menurut pak Amin sebesar 5,8 %, pak Yanda yakni sebesar 2,8 %, pak Viktor yakni sebesar 2%.

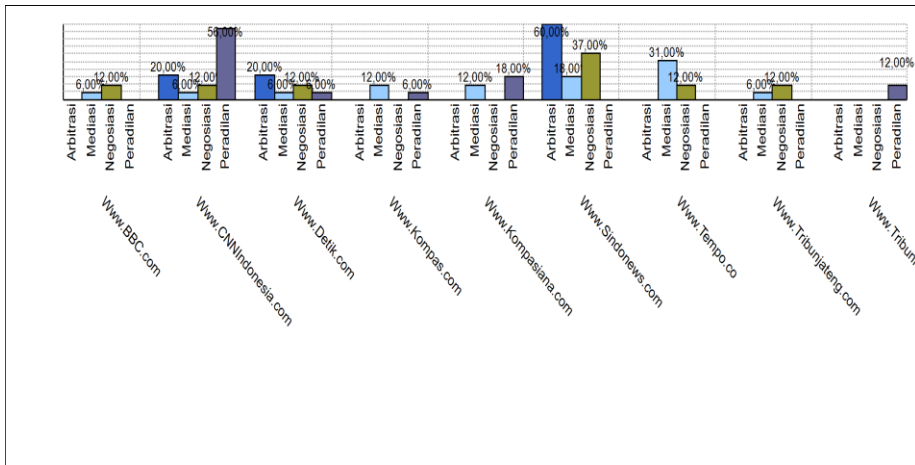
Hasil penelusuran peneliti dari berbagai media jaring/online yang mewartakan terkait penyelesaian konflik internal Golkar dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 4. 6 Persentase Proses Penyelesaian Konflik Internal Partai Golkar Melalui Berita Online

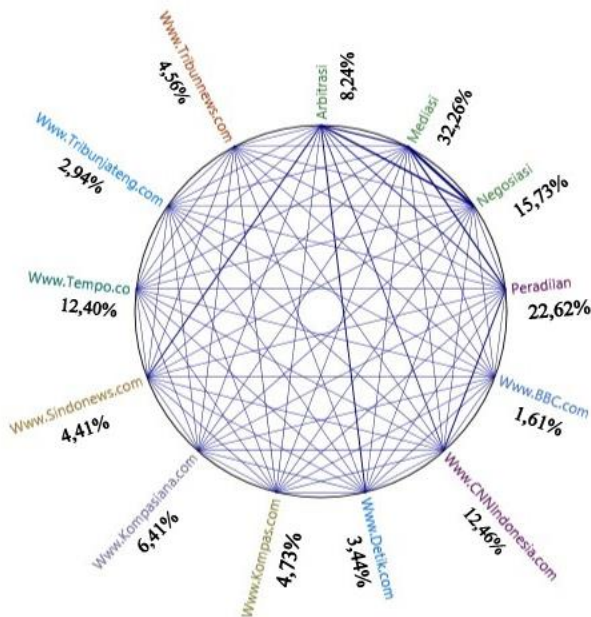
Sumber: (Crosstab Query with Nvivo 12 Plus, 2020)

Dari hasil analisis *Crosstab Query* dengan menggunakan *software Nvivo 12 Plus* bahwa dalam langkah penyelesaian konflik internal Partai Golkar; negosiasi lebih sering diberitakan oleh www.sindonews.com yakni sebesar 37,00%. Selanjutnya mediasi sebesar 31,00% sering dimuat di www.tempo.co, arbitrase sebesar 60,00% (www.sindonews.com), dan peradilan sebesar 53,00% (www.CNNIndonesia.com).



Gambar 4. 7 Persentase Proses Penyelesaian Konflik Internal Partai Golkar Melalui Berita Online

Sumber: (Cluster Analysis with Nvivo 12 Plus, 2020)



Gambar 4. 8 Konektivitas

Sumber: (Cluster Analysis with Nvivo 12 Plus, 2020)

Berdasarkan Grafik dan Gambar cluster analysis diatas menunjukkan konektivitas antara beberapa media dan mendapatkan beberapa variabel penyelesaian konflik dalam internal partai golkar, tinggi rendahnya nilai tingkat kepadatan garis penghubung antara media-media yang bereputasi di Indonesia. Besar nilai kesamaan konten dari masing-masing media yang dianalisa tergantung dengan frekuensi kalimat yang diucapkan oleh para informan media (Howard, Kelly, & François, 2018). Adanya kesamaan konten dalam beberapa media diatas, media Www.CNNIndonesia.com 12,46%, selanjutnya diikuti oleh Www.Tempo.co 12,40%, Www.Kompasiana.com 6,41%, Www.Kompas.com 4,73%, Www.Tribunnews.com 4,56%, Www.Sindonews.com 4,41%, Www.Detik.com 3,44%, Www.Tribunjateng.com 2,94%, dan Www.BBC.com 1,61%. Nilai tersebut mempunyai kesamaan konten terhadap beberapa indikator dalam penyelesaian konflik internal partai golkar, jika dilihat persentase dalam indikatornya yaitu: Pertama, Mediasi dengan jumlah 32,26%, selanjutnya disusul dengan Peradilan sebesar 22,62%, Negosiasi 15,73%, dan yang terakhir Arbitrasi sebesar 8,24%.